

2020

RENCANA KINERJA KECAMATAN SUKODONO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas berkat Rachmad serta karuniaNya sehingga Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat menyusun Rencana Kinerja untuk Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rencana Kinerja Kecamatan Sukodono berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono dalam tahun anggaran 2020. Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kinerja Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2020 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diuraikan pada Rentra Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja. Yang selanjutnya Rencana Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah akan menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Sukodono diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sehingga program dan kegiatan Kecamatan Sukodono dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kinerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Lumajang, Juli 2019
CAMAT SUKODONO

BAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP. 1979016 99810 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	11
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

RKPD adalah Rencana Kinerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap OPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun anggaran 2020 dimaksud diharapkan semua target yang telah ditetapkan dalam OPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang diharapkan dapat tercapai. Dalam agenda pembangunan yang telah dicanangkan dalam tahun 2018 – 2023.

Sasaran kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sukodono adalah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, kelompok- kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan, untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan

yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

2. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Sukodono tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
6. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4663).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
19. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan;
25. Keputusan bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian kewewenangan Bupati kepada Camat.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud :

Maksud dalam Penetapan Rencana Kinerja OPD Kecamatan Sukodono Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam Review Renstra Kecamatan Sukodono 2018–2023.

3.2. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah sebagai parameter dalam pengukuran capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan Sukodono antara lain :

- a. Mewujudkan tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Sukodono;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Sukodono;
- c. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

4. Sistem Matika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Kecamatan Sukodono diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4. Program Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Umum
5. Program peningkatan administrasi pemerintahan desa
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

Untuk Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu lebih jelasnya dapat dilihat pada T-C.29 dibawah ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SUKODONO

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5		6		7			8	9
3	05	Urusan Pemerintahan Umum										
		2018										
01		Program pelayanan administrasi perkantoran			276.232.000	271.226.559	98,19%	100%				
	021	- Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun		276.232.000	271.226.559	98,19%	12 bln				
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			195.600.000	194.627.700	99,50%	100%				
	045	- Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana hasil pengadaan		104.650.000	104.650.000	100,00%	- 6 set alat dapur				
								- 1 unit motor				
								- 3 unit mebelir				

									- 1 unit kulkas		
									- 1 set home use		
									- 2 bh tabung PMK		
									- 6 unit pesonal komputer		
									- 1 set meja kursi		
	046	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		90.950.000	89.977.700	98,93%		- 1 unit mbil		
									- 6 motor roda 2		
									- 8 unit komputer		
									- 2 unit laptop		
									- 8 printer		
06		Peningk. Pengem. Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan			9.200.000	9.186.000	99,85%	91%			
	001	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan kinerja		1.220.000	1.206.000	98,85%		1 dokumen		
	003	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		2.980.000	2.980.000	100,00%		1 dokumen		
	007	- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA tahun 2018		5.000.000	5.000.000	100%		1 dokumen		

39		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			56.600.000	56.600.000	100%			
	001	- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga SIAK yang mendapat honor dan upah bulanan		56.600.000	56.600.000	100%	8 orang		
40		Program fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum			290.020.000	289.980.000	99,99%			
	001	- Kegiatan Fasilitasi partisipasi kegiatan tingkat kabupaten/propinsi /nasional (Porkab dan Lumajang jadul)	Kegiatan Fasilitasi partisipasi kegiatan tingkat kabupaten/propinsi /nasional (Porkab dan Lumajang jadul)		40.000.000	40.000.000	100%	2 kegiatan		
	002	- Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi		22.700.000	22.700.000	100%	250 org		
	003	- Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Jumlah peserta MTQ Tk. Kecamatan		5.000.000	5.000.000	100%	20 persta MTQ		
	005	- Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Jumlah kelompok posyandu Gerbangmas		9.520.000	9.500.000	99,79%	52 posyandu		
	006	- Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang menjadi obyek BBGRM		3.550.000	3.550.000	100%	10 Desa		
	007	- Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah TP. PKK lainnya		34.000.000	33.980.000	99,94%	11 TP. PKK		

	008	- Fasilitasi Paskibraka	Jumlah peserta Paskibraka , pelatih dan pendamping			70.250.000	70.250.000	100%	90 orang		
	009	- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen Musrenbang			5.000.000	5.000.000	100%	1 dokumen		
	010	- Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat	Jumlah Peserta audensi			100.000.000	100.000.000	100%	1000 org		
41		Program peningkatan administrasi pemerintahan desa				170.000.000	166.985.000	98,23%			
	001	- Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah tenaga pendamping desa			170.000.000	166.985.000	98,23%	11 pendamping desa		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukodono dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM			85	78.50	78.70	78.90	78				
2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	87%	88%	89%	90%	88%	-	-	-	
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	-	-	88%	96.6%	96.6%	96.6%	90%	-	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Sukodono dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Table. 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa masih kurang maksimal	Masyarakat belum memahami prosedur/ alur pelayanan dikecamatan	Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan
			Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan
			Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di kecamatan
		Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu	Kurang Pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
			Kurangnya pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal	Sinegritas kinerja Forkompinka belum memadai
			SDM linmas belum memadai
Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi		

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.31
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN SUKODONO**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program pelayanan administrasi perkantoran					Program pelayanan administrasi perkantoran					
a	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Sukodono	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	24 jenis	240,850	a Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Sukodono	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 jenis	253,417	ada tambahan rekening JKK
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
a	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	17 jenis	206,600	a Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	13 jenis	77,770	
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	10 jenis	87,175	b Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	7 jenis	102,180	

3	Peningk. Pengem. Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan					Peningk. Pengem. Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan						
	a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kec. Sukodono	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 dok	2,720	a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kec. Sukodono	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	6 dokumen SAKIP	2,500
	b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kec. Sukodono	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dok	1,775	b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kec. Sukodono	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen laporan keuangan (6 bendel)	2,500
	c	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kec. Sukodono	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	1 dok	3,410	c	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kec. Sukodono	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	1 dokumen Rencana Kerja / RKA (20 bendel)	9,740
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						
	a	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan;	Kec. Sukodono	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10 desa	317,388	a	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan;	Kec. Sukodono	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10 desa	272,700
				Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10 desa					Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10 desa	
			Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10 desa					Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10 desa		

b	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	100 orang	20,680	b	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	100 org linmas	21,300,000
c	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54 Pokmas	194,282	c	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54 Pokmas	274,310
			Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan	575 org					Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan	575 org	
d	Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;	Kec. Sukodono	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	5 unsur	3,720	d	Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;	Kec. Sukodono	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	5 unsur	6,057
			Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10 desa					Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10 usulan	
			Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10 usulan					Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10 desa	
e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kec. Sukodono	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	102 pemohon	68,165	e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kec. Sukodono	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	240 pemohon	77,525
			Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	7670 pemohon					Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	7850 pemohon	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kinerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Sukodono. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN SUKODONO**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				
	a Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Sukodono	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 jenis	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	a Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	13 jenis	

	b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sukodono	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	7 jenis	
3		Peningk. Pengem. Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan				
	a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kec. Sukodono	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	6 dokumen SAKIP	
	b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kec. Sukodono	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen laporan keuangan (6 bendel)	
	c	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kec. Sukodono	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	1 dokumen Rencana Kerja / RKA (20 bendel)	
4		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				
	a	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan;	Kec. Sukodono	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10 desa	
				Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10 desa	
				Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10 desa	
	b	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	100 org linmas 100 org Satgas	
	c	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;	Kec. Sukodono	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54 Pokmas	
				Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan	575 org	
	d	Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;	Kec. Sukodono	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	5 unsur	
				Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10 usulan	
				Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10 desa	
	e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kec. Sukodono	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	240 pemohon	
				Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	7850 pemohon	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menentukan kebijakan daerah tentunya harus mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat nasional. Hal ini dilakukan agar apa yang akan kita capai bisa selaras mulai dari pusat sampai ke bawah, semua itu sudah tertuang dalam RPJMN yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan RPJMD.

Sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan tentunya bersumber dari RPJM yang selanjutnya akan disusun Renstra di tingkat OPD. Yang nantinya Renstra OPD akan menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Didalam RPJMD tersebut akan membahas visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang. Sasaran Kabupaten Lumajang akan menjadi tujuan yang dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan dari Rencana kinerja merupakan lanjutan dari tujuan dan sasaran yang sudah tercantum dalam renstra Kecamatan Sukodono tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Sukodono dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Sukodono untuk lima tahun kedepan telah menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**

1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran dari visi.

Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukodono selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Sukodono, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

Dengan Indikator sebagai berikut :

- a. Nilai IKM Kecamatan;
- b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
- c. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu;

1.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Jatiroto diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran;
 - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD/LAKIP
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - d. Penyusunan Rencana Kerja
 - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Fasilitasi dan koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Peningkatan Pelayanan administrasi pada masyarakat

Tabel T-C.33.
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN
SUKODONO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Umum								
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan peanaan administrasi perkantoran							
	a Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Sukodono	26 jenis	240.850.000	DAU		24 jenis	264,935,000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai							
	a Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Kec. Sukodono	13 jenis	206.600.000	DAU		15 jenis	426,600,000

		b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	Kec. Sukodono	7 jenis	87.175.000	DAU		8 jenis	95,892,000	
			Peningk. Pengem. Sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
		a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kec. Sukodono	6 dok. SAKIP	2.720.000	DAU		5 dok	2,991,000	
		b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Sukodono	1 dokumen laporan keuangan (6 bendel)	1.775.000	DAU		1 dok	1,950,000	
		c	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	Kec. Sukodono	1 dokumen Rencana Kerja / RKA (20 bendel)	3.410.000	DAU		1 dok	3,751,000	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	a. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa						100%	350,000,000	
				b. Persentase koordinasi trantib yang difasilitasi							86.0%	
				c. Persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi							90%	
				d. Persentase usulan musrenbang yang diakomodir							87%	-

				e. Persentase permohonan perijinan dan non perijinan yang diselesaikan tepat waktu					92%	
		a	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan;	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	Kec. Sukodono	10 desa	317.388.000	DAU	10 desa	350,000,000
				Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes		10 desa			10 desa	
				Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes		10 desa			10 desa	
		b	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	Kec. Sukodono	100 org linmas	20.680.000	DAU	100 orang	22,748,000
		c	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kec. Sukodono	54 Pokmas	194.282.000	DAU	54 Pokmas	213,710,000
				Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan		575 org			600 org	
		d	Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	Kec. Sukodono	5 unsur	3.720.000	DAU	5 unsur	4,092,000
				Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan		10 usulan			10 desa	
				Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi		10 desa			10 usulan	
		e	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	Kec. Sukodono	240 pemohon	68.165.000	DAU	105pemohon	75,000,000
				Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani		7850 pemohon			7675 pemohon	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sukodono selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sukodono.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program Kecamatan Sukodono tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkatoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

Dari beberapa program diatas dapat disusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran;

2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.'
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;
8. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukodono adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi , yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD,

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sukodono.

Rencana Kerja yang dilaksanakan selama satu tahun diharapkan juga bisa menjadi dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh pimpinan OPD maupun staf di lingkungan Kecamatan Sukodono, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi Stakholders di Kecamatan Sukodono, ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukodono ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lumajang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dilaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan renstra yang telah dibuat
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat.

Sukodono, Juli 2019


KABUPATEN SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO
BAYU EUSWANTORO, S.STP
NIP. 1979016 99810 1 002